

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA*

Oleh : Dáni Krisnawati**

ABSTRACT

The penal sanctions formulated by the Law No. 5/1997 reveal an accumulation of prison sanction and fines, which has a relatively high maximum fines. Problems occurred in cases when fines were not remunerated, which according to the Criminal Code (KUHPidana) the prisoner must substitute it with a maximum prison sentence of six month or eight month when concursus and recidive exist. The problems above happen because the Psychotropic Law does not devise a measure to deal with such situation.

This research is undertaken to improve understandings on the implementation of fine sanctions on psychotropic crimes and investigate challenges faced during its implementation. Research was carried out through literatures review and field works. Primary data were obtained from the respondents and secondary data were collected from criminal court files at research locations.

From the research, it was found that the fine sanction was not properly implemented because prisoners tended not to comply with it. Instead, they prefer to substitute it with prison sanctions. The research has discovered that the main factors associated with such substitution are the lack of ability and willingness to pay of the prisoners. The policy formulated in the Psychotropics Law aiming at imposing high fine sanction can not therefore be met. It is suggested to develop a specific regulation not in compliance with Article 30 of the Criminal Code dealing with un-remunerated fines or a substitution of fine sanctions by amendment of the Psychotropics Law.

I. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dengan berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan suatu masalah nasional maupun internasional yang sangat kompleks, serta dapat merusak maupun mengancam kehidupan suatu bangsa sekaligus melemahkan ketahanan nasional.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *World Drug Report 2000* dijelaskan bahwa "Trafficking is now

a global phenomenon, touching 170 countries and territories. The strongest growth in trafficking in the 1990s was for amphetamine-type stimulants (ATS). Trafficking shows the following regional concentrations : cocaine and marijuana in the Americas; opiates in Asia and Europe; hashish in Europe; and ATS in Asia and Europe. The largest seizures worldwide concerned cannabis. Growth rates of heroin and cocaine seizures declined in the 1990s compared to the 1980s".¹

* Laporan Hasil Penelitian Tahun 2003

** Dra. S.H., M.Hum. Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen psikotropika. Keadaan ini dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) pabrik ekstasi di Tangerang pada awal April 2002.²

Laporan *United Nations Drugs Control Programme* (UNDCP) PBB menjelaskan bahwa dilihat dari peta dunia, masalah narkotika di Indonesia digambarkan dengan warna kuning, sedangkan untuk masalah psikotropika digambarkan dengan warna merah. Warna merah adalah peringkat teratas, kemudian disusul warna kuning di bawahnya.

Dalam rangka menanggulangi bahaya penyalahgunaan psikotropika yang semakin meresahkan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang tersebut menggunakan sarana penal untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana yang terlihat sangat diandalkan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika.

Perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. Perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar yaitu dari puluhan juta hingga milyaran rupiah untuk ancaman maksimal pidana dendanya.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa apabila denda tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum di dalam KUHPidana dengan mengingat Pasal 103 KUHPidana. Pasal 103 KUHPidana menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan

yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Oleh karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tidak mengatur mengenai ketentuan tersebut maka berlakulah ketentuan di dalam KUHPidana. Dengan demikian berlakulah Pasal 30 KUHPidana yang menegaskan bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah enam bulan atau dapat menjadi maksimum delapan bulan apabila ada pemberatan (*recidive* atau *concurus*).

Sebenarnya kebijakan formulasi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 ini semula nampak ada kecenderungan untuk memberikan jumlah ancaman pidana denda yang setinggi mungkin bagi pelaku tindak pidana psikotropika, mengingat sanksi pidana denda mengandung nilai ekonomis, apalagi sanksi pidana denda ini pada umumnya dikumulasikan dengan pidana penjara. Selanjutnya diharapkan terjadinya penyalahgunaan psikotropika dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara itu di sisi yang lain terlihat bahwa kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda tersebut tidak diikuti dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi pidana denda. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan 31 KUHPidana. Di samping itu Pasal 30 KUHPidana juga tidak mengatur mengenai diperbolehkannya dilakukan tindakan-tindakan lain yang dapat memaksa terpidana untuk membayar dendanya seperti dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya.

Pada dasarnya perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi atau tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang,

² www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2002041323330410, 7 Oktober 2003, hlm. 1

³ Kompas, 27 Juni 2002, hlm. 10

2. Tahap aplikasi atau tahap penerapan pidana oleh pengadilan,
3. Tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁴

Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Penelitian ini secara spesifik lebih menekankan pada masalah yang timbul pada tahap ketiga. Selanjutnya akan dikaji secara lebih dalam mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika. Bertitik tolak dari persoalan ini nantinya dapat diketahui apakah terpidana yang dijatuhi pidana denda secara kumulasi dengan pidana penjara pada akhirnya akan membayar dendanya atau sebaliknya terpidana tidak sanggup membayar denda atau bahkan sengaja memilih tidak membayar denda dan pada akhirnya menjalani pidana kurungan pengganti denda.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika ?

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan mengenai Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Menurut Pasal 270 KUHAP yang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa.

Oleh karena perumusan sanksi pidana di dalam UU Psikotropika sebagian besar menggunakan perumusan kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, maka dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut pidana denda, pidana denda dibayar melalui Jaksa.

Sehubungan dengan cara melaksanakan pidana denda, ketentuan Pasal 273 KUHAP menegaskan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda maka kepada terpidana diberi kesempatan selama satu bulan untuk membayar denda tersebut, dan apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dapat dibayar, maka jangka waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Dalam kaitan ini perkara psikotropika termasuk dalam acara pemeriksaan biasa.

Lazimnya Jaksa pada kesempatan pertama setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan menanyakan kepada terpidana mengenai waktu pembayaran denda sekaligus membuat pernyataan pelunasan denda tersebut apabila pidana denda langsung dilunasi.⁵

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman berkaitan dengan tugas Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda pada tindak pidana psikotropika menunjukkan bahwa Jaksa tidak melaksanakan cara pembayaran denda bagi terpidana seperti yang telah diatur dalam KUHAP. Dalam prakteknya jangka waktu pembayaran pidana denda pada tindak pidana psikotropika tersebut dimulai sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan sebelum berakhirnya masa menjalani pidana penjara. Pidana denda yang telah dibayar tersebut oleh

⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4

⁵ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 489

Jaksa dalam waktu 1 x 24 jam akan dikirim melalui Kantor Pos dan masuk ke Kas Negara.

Berdasarkan kondisi yang terjadi dalam praktek tersebut, maka bagi terpidana tindak pidana psikotropika yang dijatuhi pidana misalnya dengan pidana penjara dua tahun dan pidana denda, maka pidana denda tersebut dapat dibayar dalam rentang waktu dua tahun yaitu sampai pidana penjara dua tahun itu dijalani. Aturan yang berlaku di dalam praktek ini tidak mematuhi ketentuan yang ada di dalam KUHAP bahwa setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kesempatan terpidana untuk membayar dendanya adalah selama satu bulan, dan dapat diperpanjang satu bulan lagi. Dengan kata lain jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama adalah dua bulan. Setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.

Sedangkan bentuk koordinasi antara Jaksa dengan petugas Lapas berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana denda adalah apabila terpidana atau keluarga terpidana telah membayar denda kepada Jaksa, maka selanjutnya Jaksa memberitahu atau mengirimkan fotokopi bukti pembayaran denda tersebut kepada petugas Lapas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya pidana denda dapat disubsidierkan dengan pidana kurungan. Berarti jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Sedangkan jika denda sudah dilunasi maka terpidana dapat segera dibebaskan dari pidana kurungan pengganti tersebut.

Telah dijelaskan bahwa Jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di samping itu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman maupun di dalam KUHAP ditegaskan pula adanya tugas bagi Hakim untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan (Hakim

Wasmat). Dalam hal putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan Hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggungjawab atas putusan yang dijatuhkannya, sehingga Hakim harus mengetahui apakah putusannya tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan tidak hanya berakhir sampai penjatuhan putusan.

Pada setiap pengadilan ditunjuk beberapa Hakim Wasmat untuk waktu dua tahun, dan bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara/kurungan dalam Lapas yaitu menyangkut perilaku narapidana maupun perlakuan para petugas Lapas terhadap narapidana. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim tersebut, maka Hakim akan dapat mengetahui hasil yang baik maupun buruk dari suatu putusan pengadilan. Secara teoritis semangat yang meniwai diaturnya pengawasan oleh Hakim tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksan tetapi juga dengan lembaga masyarakat sebagai suatu rangkaian proses pidana.

Berdasar hasil penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, selalu ada Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Wasmat. Bentuk koordinasi antara Hakim Wasmat dengan Jaksa hanya bersifat administratif dan tidak langsung, yaitu setiap kali Jaksa akan melakukan eksekusi terlebih dahulu membuat laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

Sedangkan bentuk koordinasi antara Hakim Wasmat di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Petugas Lapas Kelas II A Yogyakarta maupun antara Hakim Wasmat di Pengadilan Negeri Sleman dengan Petugas Lapas Kelas II A Yogyakarta adalah dalam rentang waktu yang tidak tertentu, bisa enam bulan atau satu tahun sekali Hakim Wasmat atau petugas dari pengadilan sebagai wakil dari Hakim Wasmat melakukan kunjungan ke Lapas, dan melakukan tanya jawab kepada beberapa narapidana sebagai sampel.

Dalam prakteknya intensitas kunjungan Hakim Wasmat ke Lapas sangat rendah, bahkan yang datang melaksanakan tugas tersebut sebagian besar tidak dilakukan oleh Hakim Wasmat itu sendiri tetapi diwakilkan kepada petugas dari pengadilan. Oleh karena itu terlihat bahwa penunjukkan Hakim Wasmat pada setiap pengadilan ini semata-mata hanya untuk memenuhi perintah perundang-undangan saja, karena tanpa diikuti dengan pelaksanaan tugas yang seharusnya diemban oleh seorang Hakim Wasmat.

Tugas Hakim Wasmat yang diatur di dalam KUHAP adalah mengadakan pengawasan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di samping itu juga mempunyai tugas mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lapas serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Bahkan tugas pengamatan harus tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

Sedangkan berdasar hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas dari Hakim Wasmat tidak berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, termasuk dalam hal melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut tindak pidana psikotropika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bentuk putusan sanksi pidananya adalah kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Dalam hal ini pekerjaan Hakim seolah-olah memang hanya sampai dengan memutus perkara saja, setelah itu tidak ada hubungan lagi dengan terpidana. Kondisi ini juga diperburuk dengan kenyataan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Wasmat sering terbentur adanya kultur mengenai wewenang yang seolah-olah terkotak-kotak antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu upaya untuk saling mengontrol tugas antar instansi tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Tabel 1
Jumlah Perkara Psikotropika dan Denda yang Dibayar

Tahun	Data Kejaksaan Negeri Yogyakarta ¹⁾		Data Kejaksaan Negeri Sleman ²⁾		Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ³⁾	
	Jumlah Perkara	Perkara yang Dendanya Dibayar	Jumlah Perkara	Perkara yang Dendanya Dibayar	Jumlah Perkara	Perkara yang Dendanya Dibayar
2000	30	8	21	5	21	5
2001	35	2	28	5	28	5
2002	27	-	20	2	20	2
s/d Juli 2003	15	1	22	4	22	4

Sumber : 1) Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 2003

2) Kejaksaan Negeri Sleman, 2003

3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, 2003

B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda oleh Narapidana Tindak Pidana Psikotropika

Berdasarkan data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah seluruh perkara psikotropika dari tahun 2000 sampai dengan Juli 2003 tersebut merupakan bentuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan sanksi pidananya adalah kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda (lihat Tabel 1).

Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasar data dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, persentase jumlah perkara psikotropika yang dendanya

dibayar pada tahun 2000 adalah sebesar 26,67 %, tahun 2001 sebesar 1,75 %, tahun 2002 tidak ada narapidana yang membayar denda sehingga nantinya menjalani kurungan pengganti denda, dan sampai dengan Juli 2003 sebesar 6,67 %. Dari Kejaksaan Negeri Sleman dapat diketahui bahwa pada tahun 2000 persentase jumlah perkara psikotropika yang dendanya dibayar adalah sebesar 23,81 %, tahun 2001 sebesar 17,57 %, tahun 2002 sebesar 10 %, dan sampai dengan Juli 2003 sebesar 18,18 %. Sedangkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dapat dilihat bahwa persentase jumlah perkara psikotropika yang dendanya dibayar adalah sebesar 22,58 %, tahun 2001 sebesar

Tabel 2.
Besar Denda, Kurungan Pengganti Denda dan Jumlah Perkara Psikotropika

No	Denda (Rp)	Kurungan Pengganti Denda (bulan)	Jumlah Perkara
1	500.000	2	2
2	1.000.000	1	11
3	1.000.000	2	4
4	1.000.000	3	2
5	1.000.000	4	1
6	1.250.000	1 (+10 hari)	1
7	1.500.000	1	1
8	1.500.000	1 (+15 hari)	3
9	2.000.000	1	2
10	2.000.000	2	3
11	2.500.000	2	7
12	2.500.000	3	1
13	3.000.000	2	1
14	3.000.000	3	2
15	3.500.000	2	1
16	5.000.000	1	2
17	5.000.000	2	1
18	5.000.000	3	2
19	5.000.000	4	2
20	10.000.000	1	1
21	10.000.000	3	1
			51

Sumber : 1) Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 2003
2) Kejaksaan Negeri Sleman, 2003
3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, 2003

19,51 %, tahun 2002 sebesar 6,45 %, dan sampai dengan Juli 2003 sebesar 22,22 %.

Berdasarkan data di atas, persentase tertinggi yang membayar denda adalah sebesar 26,67 % sedangkan persentase paling rendah ditunjukkan dengan tidak ada narapidana yang membayar dendanya selama kurun waktu satu tahun tertentu tetapi menjalani pidana kurungan pengganti denda. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persentase narapidana yang membayar denda adalah rendah, dengan demikian sebagian besar narapidana pada akhirnya menjalani pidana kurungan pengganti denda.

Besarnya (rupiah) denda yang dibayar dari tahun 2000 sampai dengan Juli 2003 berdasar data dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasar data yang disajikan mengenai besarnya (rupiah) denda yang dibayar tersebut (lihat Tabel 2) maka pidana denda tertinggi yang dibayar adalah sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan pidana denda yang paling rendah dibayar adalah sebesar Rp. 500.000,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya kemampuan untuk membayar denda ini sebenarnya tidak dapat diukur dari besar kecilnya nilai uang yang dijadikan sebagai denda. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa besar kecilnya nilai uang bersifat relatif, dan dipengaruhi berbagai faktor lain seperti beragamnya kondisi sosial ekonomi dari narapidana itu sendiri.

Di samping itu jangka waktu lamanya pidana kurungan pengganti bukan merupakan alasan bagi seorang narapidana untuk membayar atau tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan padanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan ada seorang narapidana yang dijatuhi pidana denda Rp. 10.000.000,- yang relatif cukup tinggi dengan subsider satu bulan kurungan yang relatif masa pidananya singkat, narapidana ini memilih untuk membayar pidana dendanya.

Selanjutnya penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan narapidana sebagai responden. Jumlah keseluruhan narapidana dewasa yang ada di Lapas Kelas II A Yogyakarta sampai dengan 30 September 2003 sebanyak 430 orang. Sedangkan narapidana dewasa khusus perkara psikotropika sebanyak 58 orang. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan 30 narapidana dewasa yang terdiri dari 6 narapidana wanita dan 24 narapidana laki-laki.

Dari 30 narapidana psikotropika yang diwawancara, 25 narapidana atau 83,33 % responden menyatakan tidak akan membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan jumlah narapidana yang sudah membayar denda sebanyak 2 orang atau 6,67% dari responden, dan jumlah narapidana yang berencana untuk membayar denda diakhir masa menjalani pidana penjara sebanyak 3 orang atau 10 % dari responden. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 83,33 % responden sudah pasti tidak akan membayar denda, dan pada akhirnya akan melaksanakan pidana kurungan pengganti yaitu suatu pidana kurungan yang mengganti pidana denda.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan terhadap narapidana yang tidak membayar pidana denda, maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika ini disebabkan :

1. Faktor Ekonomi

Dari 25 narapidana psikotropika yang menyatakan tidak akan membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dan memilih untuk melaksanakan pidana kurungan pengganti memberikan alasan sebagai berikut: sebanyak 17 narapidana atau 68 % responden menyatakan karena tidak ada biaya. Sebanyak 2 narapidana atau 8 %

responden menyatakan karena dendanya terlalu tinggi. Sedangkan sebanyak 6 narapidana atau 24 % responden menyatakan jika ada uang lebih baik untuk modal usaha.

Di sisi yang lain sebenarnya pada pidana kurungan pengganti denda ini prinsipnya orang lain atau keluarga terpidana yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang bersangkutan diperbolehkan untuk membayar denda yang telah diwajibkan kepada terpidana untuk dibayarnya. Namun demikian tetap saja banyak narapidana yang merasa kesulitan untuk membayar dendanya.

2. Faktor Kemauan Narapidana

Dalam hal ini narapidana psikotropika sudah mengetahui ketentuan tentang pidana kurungan pengganti jika pidana denda tidak dibayar. Dengan kata lain betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan, apabila narapidana tidak dapat membayar atau tidak mau membayar maka konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimum ancamannya hanya enam bulan atau dapat menjadi paling lama delapan bulan kalau ada pemberatan.

Selain itu narapidana juga sudah memperhitungkan adanya remisi (pengurangan hukuman) antara lain karena berkelakuan baik sehingga dapat mengurangi masa menjalani pidana yang seharusnya di tempuh. Di samping itu narapidana juga sudah memperhitungkan adanya pelepasan bersyarat yang dapat diajukan jika telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan.

Pengetahuan mengenai hal tersebut di atas diperoleh narapidana berdasar informasi dan pengalaman dari narapidana yang lain di dalam Lapas. Pengetahuan yang dimiliki ini menjadi alasan pendukung bagi narapidana untuk

tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana psikotropika tidak berjalan dengan optimal karena berdasar hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar narapidana tidak melaksanakan pidana denda tersebut, dan sebagai konsekuensinya adalah menjalani pidana kurungan pengganti denda. Alasan yang diajukan para narapidana tersebut didasarkan pada faktor ekonomi maupun faktor kemauan narapidana untuk membayar dendanya. Kondisi yang demikian ini merupakan faktor penghambat pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

Dengan demikian implementasi kebijakan formulasi pada UU Psikotropika untuk memberikan jumlah ancaman pidana denda yang setinggi mungkin bagi pelaku tindak pidana psikotropika menjadi tidak tercapai, mengingat sanksi pidana denda mengandung nilai ekonomis, sedangkan di dalam pelaksanaannya banyak yang tidak membayar pidana denda dan pada akhirnya menjalani pidana kurungan pengganti denda.

Oleh karena itu selama belum ada perubahan kebijakan formulasi mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda sehingga masih mengikuti aturan umum dalam KUH-Pidana, maka tidak akan banyak artinya membuat suatu kebijakan dengan menaikkan jumlah ancaman pidana denda seperti yang terjadi di dalam UU Psikotropika yang berlaku sekarang ini.

B. Saran

Perlu diadakan ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHPidana yang

⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 95

mengatur mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan amandemen pada UU Psikotropika.

Di samping itu pada masa mendatang dalam UU Psikotropika perlu ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar termasuk mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang
Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
UNODC, *World Drug Report 2000 – Executive*

Summary, www.unodc.org/odccp/wdr_executive_summary_2000.html, 28 September 2003
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Kompas, 27 Juni 2002
Media Indonesia, www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2002041323330410, 7 Oktober 2003